



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4253/KOM-D/SD-S1/2021

**PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI RIAU**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri
Sulthan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.I.kom)

Oleh :

DIAH NURUL WULANDARI

NIM.11643202902

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau” yang ditulis oleh :

Nama : Diah Nurul Wulandari
NIM : 11643202902
Prodi : Ilmu Komunikasi

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 November 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2020
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / penguji I

Dr. Nurdin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

Penguji III

Drs. H. Arwan, M.Ag
NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji IV

Intan Kemala, S.sos, M.Si
NIP. 19810612 200801 2 017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSYARATAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Nurul Wulandari
 NIM : 11643202902
 Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Desember 1996
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Desember 2020



Diah Nurul Wulandari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Diah Nurul Wulandari
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau.

Keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna menjalankan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan teori empat langkah proses public relations menurut Cutlip Center Broom. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan program dilakukan dengan cara menetapkan *stakeholder*, mengumpulkan informasi yang aktual dan memilih media. *Kedua*, tindakan yang dilakukan oleh humas pada sebuah program dimulai dari tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan menggunakan *website* saja sebagai program layanan publik, pada tahun 2017 humas menggunakan facebook dan tahun 2019 media sosial pun menjadi pilihan humas. *Ketiga*, evaluasi program sudah diterapkan dengan baik oleh humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, dilihat dalam melakukan evaluasi humas mencari kendala atau permasalahannya dengan cara rapat agar menemukan solusi.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Humas.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Diah Nurul Wulandari
Majors : Communication Science
Title : Implementation of Public Information Disclosure at the Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement and Land Services Office of Riau Province.

Public information disclosure is a means of optimizing public supervision of state administration in order to run good governance. The purpose of this study was to determine the implementation of public information disclosure at the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement Areas and Lands of Riau Province. This study uses a four-step theory of the public relations process according to Cutlip Center Broom. The results of this study indicate the implementation of public information disclosure carried out by the public relations of the Riau Province Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement and Land Affairs Office, as follows: First, programming is carried out by determining stakeholders, gathering actual information and selecting media. Second, the actions taken by public relations in a program started in 2012 at the Public Works, Spatial Planning, Housing, Residential Areas and Land Office of Riau Province by using the website alone as a public service program, in 2017 Public Relations used Facebook and in 2019 social media became the choice of public relations. Third, the program evaluation has been implemented properly by the public relations of the Riau Province Public Works, Spatial Planning, Housing, Settlement and Land Office, seen in conducting a Public Relations evaluation looking for obstacles or problems by meeting to find solutions.

Keywords: Public Information Openness, Public Relations.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Mazlan dan ibunda Mardiani yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendidik, membimbing, mendo'akan serta selalu memberikan dukungan kepada penulis supaya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas semua yang diberikan dan dilakukan oleh ayahanda dan ibunda yang tidak bisa penulis lupakan bahkan tidak akan bisa terbalaskan oleh penulis. Kemudian kepada adik-adik penulis tersayang, Adhella Dwi Shukma dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ikrhom terimakasih selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Drs. Suryan A. Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak H. Kusnaedi, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu yang Bapak miliki menjadi berkah, Amin.
6. Ibu Drs. Atjih Sukaesih, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi dan Bapak Yantos, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dewi Sukartik, S.Sos, M.Sc selaku Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, serta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Kepala Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim dan serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dititipkan Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak Yasin Azwar, S.Ag, Bapak Oktadino H, S.Kom, Ibu Amelia Roza, SE dan Bapak Fahrizal, S.Kom selaku Informan Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang sudah menerima penulis dengan baik, telah memberikan izin, kesempatan, bimbingan dan bantuan dalam penelitian skripsi ini.

11. Kepada Muhammad Novandri yang telah membantu, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada teman-teman Pejuang Skripsi yaitu Muhammad Akram S.I.kom, Hafid Aldi, Eka Purnanda, Muhammad Zaki Fikriandani, dan Hastary Mella Hayati merupakan teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman Ilmu Komunikasi Angkatan 2016 dan Public Relations B 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena sudah mewarnai hari-hari penulis selama perkuliahan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Pekanbaru, 23 Oktober 2020

Penulis

Diah Nurul Wulandari

11643202902

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
1. Keterbukaan Informasi Publik.....	4
2. Humas	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
1. Keterbukaan Informasi Publik.....	8
2. Humas	10
B. Kajian Terdahulu	13
C. Kerangka Pikir.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	18
C. Sumber Data	18
1. Sumber Data Primer	18
2. Sumber Data Sekunder	18
D. Informan Penelitian	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Wawancara	20
2. Observasi	20
3. Dokumentasi	21
F. Validitas Data.....	21
G. Teknik Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	24
A. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	24
B. Visi.....	25
C. Misi.....	25
D. Struktur Organisasi.....	25
E. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	27
F. Tugas Pokok dan Fungsi	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Penyusunan Program (<i>programming</i>).....	32
2. Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi (<i>taking action and communicating</i>)	41
3. Evaluasi Program (<i>evaluating the program</i>)	46
B. Pembahasan	50
1. Penyusunan Program (<i>programming</i>).....	51
2. Melakukan Tindakan dan Berkomunikasi (<i>taking action and communicating</i>)	57
3. Evaluasi Program (<i>evaluating the program</i>)	59
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	70
DOKUMENTASI.....	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	20
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Pada Tahun 2019 Berdasarkan Golongan	27
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Pada Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	27
Tabel 5.1 Karakteristik Media	53





1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	16
Gambar 4.1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.....	24
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bagian Humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	26
Gambar 5.1 Website ppid.riau.go.id	34
Gambar 5.2 Rapat Membahas Tentang Pengelola Website Media Sosial.....	35
Gambar 5.3 Website Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	37
Gambar 5.4 Facebook Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	37
Gambar 5.5 Instagram Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	38
Gambar 5.6 website m.siagaonline.com	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah.¹ Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan hasil dari usaha-usaha yang dilakukan oleh semua pihak yang mendukung tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.² Pada saat Keterbukaan Informasi Publik diterapkan nampaknya adalah semua urusan tata ke pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan kebijakan publik serta informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Hal seperti ini bagi sebagian atau mungkin, seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau tidak terbiasa untuk dilakukan.³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah hanya sebagian kecil informasi yang dapat di akses oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik yang memang disediakan

¹ Kristiyanto, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16. No. 2, Juni 2016, 231-244.

² Edwin Nurdiansyah, "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, November 2016, 148.

³ Nunuk Febrianingsih, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 1, No.1, April 2012, 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah daerah. Salah satu perangkat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan inovasi *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengakses informasi secara mudah guna meningkatkan transparansi masyarakat sehingga dapat menjadi sarana *check and balances*.⁴ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada realitasnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sudah membuat *website* dan membuat akun media sosial seperti facebook dan instagram, hal ini dilakukan agar dapat mendukung transparansi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Akan tetapi, masih terdapat masalah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Disini penulis akan memaparkan fenomena terkait masalah keterbukaan informasi publik. Fenomena yang terjadi di Pekanbaru seperti pada kasus keterbukaan informasi publik yang dijelaskan oleh Yosia anggota aktivis LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (PEPARA RI) beliau mengatakan "*Adapun permohonan informasi yang diajukan ke PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau terkait pelaksanaan proyek strategis Pemerintah Provinsi Riau yaitu, "Pembangunan Masjid Raya Provinsi Riau" masjid tersebut terletak di Jalan Lintas Sumatera, Palas, Kecamatan Rumbai dimana kegiatan di SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau (PUPRPKPP) Riau itu, sesuai informasi dari masyarakat serta dibuktikan dari hasil investigasi team dilapangan, diduga pelaksanaan fisik terkesan beraroma korupsi. Bahkan terkait keberatan atas permohonan informasi lembaga kita Pemantau Prasarana Aparatur Negara Republik Indonesia (LSM PEPARA RI) ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,*

⁴Luluk Saleh, "Keterbukaan Informasi Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3. No. 1, Juni 2010, 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau (PPID Utama) pernah mengundang dalam acara rapat mediasi, tepatnya di Ruang Media Center kantor Gubernur Riau, pada hari Senin 29 Juli 2019," kata Yosia.

Namun sangat disayangkan dari hasil mediasi tersebut, dikatakan Yosia, "Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau tak mengabulkan permohonan informasi yang dimintai lembaga kita (PEPARA- RI). Pada 20 Agustus 2019 kita (PEPARA RI) mendapatkan balasan surat secara tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan perihal "Klarifikasi dan Konfirmasi Penjelasan Informasi Pembangunan Mesjid Raya Provinsi Riau," yang di tunjukkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau, tertanggal 5 Agustus 2019", ungkapanya.⁵

Pada kasus ini terdapat kelemahan dalam melaksanakan keterbukaan informasi ke publik, dikarenakan masyarakat masih sulit untuk mendapatkan informasi pembangunan yang jelas dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dan terkesan berbelit-belit. Masyarakat perlu diberi informasi tentang pembangunan karena pembangunan pada pokoknya untuk mengubah kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Kalau masyarakat tidak tahu yang sedang dibangun adalah untuk keperluan mereka sendiri, bisa-bisa mereka tidak peduli, kemungkinan yang terjadi salah sangka yang sedang dibangun adalah milik seseorang dan bukan untuk keperluan bersama.⁶ Semestinya, pemerintah secara transparansi memberikan informasi kepada masyarakat, sebab setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui semua program serta kebijakan yang

⁵m.siagaonline.com/read-23437-2019-08-23-diduga-tak-paham-uu-kip-lsm-peparari-akam-layangkan-psi-antara-dinas-pupr-riau-ke-ki.html (diakses pada 26 November 2019).

⁶Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapannya*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), 116-117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang program yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama. Pembangunan yang dimaksud penulis adalah pembangunan dalam bidang infrastruktur. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau”**. Untuk mempermudah penafsiran makna dan kata-kata sebab untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut.

B. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah disini guna untuk menjelaskan sesuai dengan istilah yang ada dalam judul, adapun penegasan istilah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Publik

Untuk mewujudkan *good governance* dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas maka keterbukaan informasi publik menjadi hal yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang dinilai menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik.⁷

2. Humas

⁷<https://ppid.riau.go.id/pages/keterbukaan-informasi> (diakses pada 27 November

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Humas adalah upaya organisasi untuk meraih kerja sama dengan sekelompok orang dan membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik utama mereka.⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

E. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu komunikasi yang didapatkan di perkuliahan, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan perencanaan kehumasan di instansi pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan andil terhadap informasi mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum,

⁸ Keith Butterick, *Pengantar Public Relations, Teori Dan Praktek*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

b) Sebagai syarat meraih gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sulthan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penulisan dalam pemilihan judul, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang mendukung penyusunan penelitian ini, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

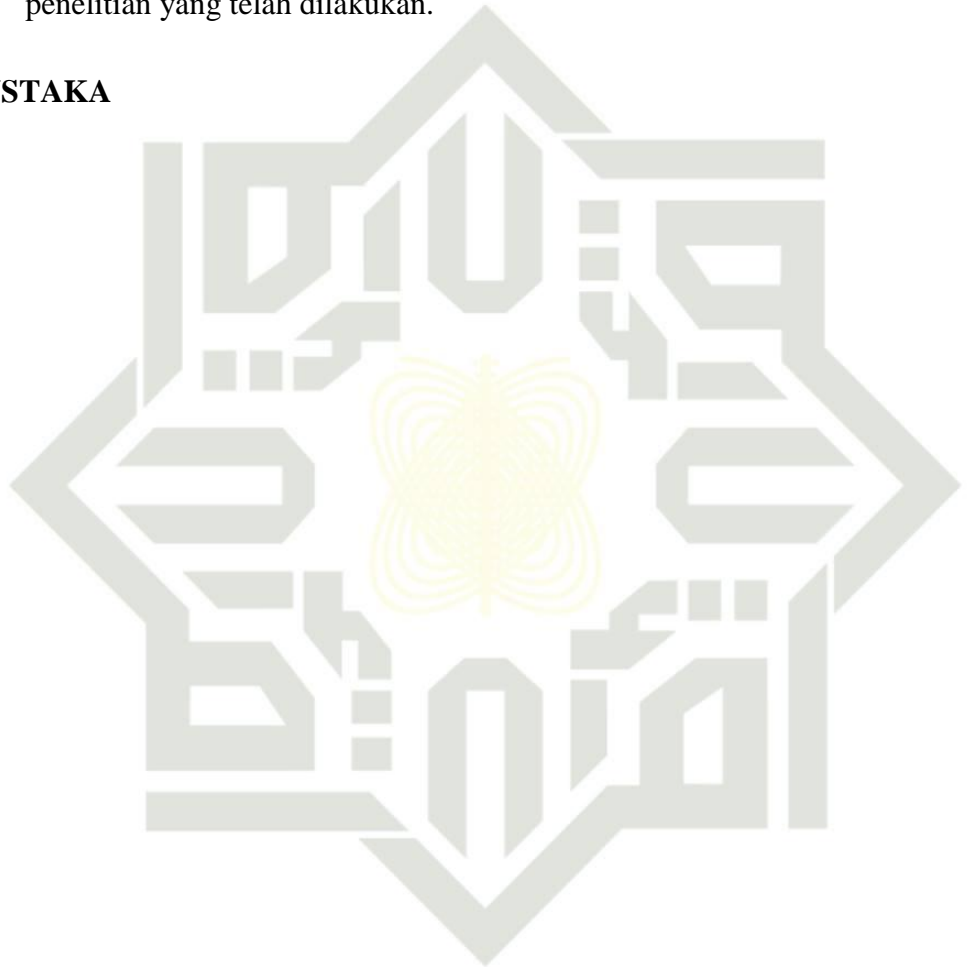
Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara guna menjalankan pemerintahan yang baik. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik itu mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan organisasi non pemerintah. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya.⁹

Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik pada dasarnya adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Di dalam pasal 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah : *Pertama*, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. *Kedua*, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. *Ketiga*, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2015), 67.

¹⁰ Notrida G.B dan Mandica Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (Irdi Dan Usaid, Cetakan Pertama, 2009), 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik yang baik. *Keempat*, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. *Kelima*, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. *Keenam*, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. *Ketujuh*, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.¹¹

Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak dimiliki masyarakat adalah hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik terdapat tiga konsep didalam keterbukaan informasi publik yaitu, adalah: sistem negara yang demokratis (*democratic state*), pemerintahan yang terbuka (*open government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*).¹² Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.¹³ Jika segala aspek penyelenggaraan pelayanan dapat diakses dengan mudah dan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah dipahami oleh publik, maka sebaliknya manakala semua atau sebagian dari aspek pelayanan tidak terbuka dan sulit untuk di akses oleh para pengguna maupun layanan para *stakeholders*, maka penyelenggaraan pelayanan tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang rendah dengan kata lain tidak memenuhi kaidah keterbukaan.¹⁴

Keterbukaan informasi yang berkembang dan kebutuhan informasi publik yang meluas akan mendorong semakin banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan haknya untuk meminta informasi publik yang ingin diketahuinya.¹⁵ Keterbukaan juga memberikan kontribusi yang

¹¹Pujiyanti, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018, 27.

¹² Ryaas Rasid, *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 13.

¹³Tony Prasetyo, “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2016, 254.

¹⁴ Djazuli dan Tri Suharno, *Keterbukaan dan Keadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Ghalia, 2006), 18.

¹⁵Fauzi Syam, “Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi”, *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No.1, Januari 2015,43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat besar dalam upaya penegakkan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Karena publik dapat menjadi apatis dalam menyikapi upaya penegakkan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai akibat aparat penegak hukum yang seringkali tidak transparan dalam proses penegakkan hukum dan praktek tebang pilih.¹⁶

2. Humas

Kegiatan humas haruslah sistematis dan terencana, tetapi terkadang juga perlu untuk berimprovisasi dan berinovasi. Suatu kebijaksanaan harus dipertimbangkan, dirumuskan, direncanakan, dan dievaluasi. Untuk ini diperlukan analisa dan data yang diperoleh tentang organisasi dan lingkungannya. Penelitian atas semua hal yang terkait harus dilakukan agar dapat diperoleh kesimpulan yang tepat demi sasaran-sasaran organisasi.¹⁷ Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan kepada masyarakat.

Terutama di Indonesia, lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas juga merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat sehingga humas memperoleh kepercayaan dari publiknya dalam arti masyarakat luas.¹⁸ Menurut George L. Morisey, dalam bukunya *Management by Objective and Results for Businesss and Industry* dalam Morissan, proses

¹⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), 194.

¹⁷ John Tondowidjojo, *Dasar dan Arah Public Relations*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002),

¹⁸ Wiji Kasmirus, "Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintah Di Kabupaten Kutai Barat", *Jurnal Administrasi Reform*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013, 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan dan penetapan program humas mencakup langkah-langkah sebagai berikut:¹⁹

Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup tugas yang hendak dilaksanakan, menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana praktisi humas harus mencurahkan waktu, tenaga, dan keahlian yang dimiliki, mengidentifikasi dan menentukan indikator efektifitas (*indicators of effectiveness*) dari setiap pekerjaan yang dilakukan, menentukan faktor-faktor struktur yang akan memengaruhi tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan, memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin dicapai, mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, programming menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. *Kedua*, penjadwalan menentukan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. *Ketiga*, anggaran, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. *Keempat*, pertanggung jawaban, menetapkan siapa yang akan mengawasi pemenuhan tujuan, yaitu pihak yang menyatakan tujuan sudah tercapai atau belum. *Kelima*, menguji dan merevisi rencana sementara sebelum rencana tersebut dilaksanakan. *Keenam*, membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan akan terpenuhi. *Ketujuh*, komunikasi, menentukan komunikasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah sebelumnya. *Kedelapan*, pelaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak yang terlibat mengenai komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah ditemukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu dilibatkan.

Kemudian menurut Cutlip Center Broom, praktisi humas professional dalam melaksanakan kegiatan humas harus terdiri atas empat langkah, berikut ini adalah penjelasan mengenai teori empat langkah

¹⁹Morissan, *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 153-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses public relations: *Pertama*, menentukan masalah (*definding problem*) meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak. *Kedua*, perencanaan dan penyusunan program (*planning and programming*) mencakup tindakan untuk memasukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama dalam kebijakan dan program organisasi. *Ketiga*, melakukan tindakan dan berkomunikasi (*taking action and communicating*) adalah kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. *Keempat*, evaluasi program (*evaluating the program*) merupakan penilaian atau evaluasi atas persiapan, pelaksanaan dan hasil program.²⁰

Tujuan humas dari sebuah organisasi mungkin bertentangan dengan tujuan-tujuan. Misalnya, perubahan-perubahan staf senior yang kerap kali terjadi, sehingga membuat organisasi berupaya menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang berubah tersebut. Barangkali, hal itu bertentangan dengan keinginan organisasi untuk memperoleh reputasi. Sebab, sasaran pemasaran keuangan, produksi, dan humas masing-masing tidak bersesuaian satu sama lain untuk hal-hal tertentu. Karena itu, humas harus disiapkan guna menunjukkan ketidaksesuaian tersebut dan untuk memonitor apakah sasaran perlu diubah atau tidak.²¹

Adapun dua alasan untuk dilakukannya kegiatan humas adalah: alasan dalam kegiatan perencanaan (*action plan*), yaitu dapat bersifat proaktif, reaktif, defensif, preventif, protektif hingga profitabel. Misalnya, seorang humas bertindak sedia payung sebelum hujan (*proaktif*) atau mencari payung ketika hujan (*reaktif*). Dan alasan mengapa (*why*) bertujuan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan lebih luas, seperti perubahan teknologi, ekonomi, politik, hukum dan teknologi, menghadapi

²⁰ Arifman Effendi, "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Kabupaten Agam", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018, 46.

²¹ Colin Coulson-Thomas, *Public Relations: Pedoman Praktis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 238.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan lebih sempit (operasional), seperti menghadapi persaingan, perubahan selera pelanggan, *life cycle product*, sistem komunikasi, media massa, tenaga kerja dan relasi bisnis, dan menciptakan tujuan yang objektif, sasaran dan target yang ingin dicapai secara jelas dan rinci.

Faktor yang cukup penting dalam berhasil atau tidaknya pelaksanaan program acara atau aktivitas kerja humas yang telah disusun adalah sebagai berikut: bagaimana perencanaan kerja dan komunikasi dari humas untuk mencapai tujuan utama, bagaimana peranan untuk pelaksanaannya dan menilai program kerja humas dan bagaimana menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik dalam; penyampaian pesan (*message*) dan mengolah dan menyalurkan arus informasi kepada publiknya dengan tujuan untuk mencapai citra positif bagi organisasi yang diwakilinya itu.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang merupakan referensi yang relevan bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Penelitian tersebut sangatlah membantu dan banyak memberikan kontribusi dan masukan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mislali dengan judul **“Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat”**.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Mislaili menyatakan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat pihak humas menggunakan strategi sebagai berikut yaitu melakukan pendekatan kemitraan dengan media massa, baik media cetak, elektronik maupun media sosial. Juga bekerja sama dengan wartawan, bekerja sama dengan pihak media baik media cetak, elektronik maupun media online. Ia menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini tentang manajemen humas pemerintah kota pekanbaru dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat sesuai dengan indikator, yaitu adalah sebagai berikut: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), mengevaluasi (*controlling*).²²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tiara Indah dan Puji Hariyanti yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”**.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya maupun pada media sosial yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan informasi publik. Hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumber daya yaitu kurangnya jumlah staf seksi pelayanan informasi publik yang merupakan implementor dalam kebijakan tersebut.²³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Radinal Indra yang berjudul **“Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya Good Governance”**.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini untuk mendukung terciptanya *good governance* sesuai indikator sebagai berikut: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Namun adanya hambatan dari segi media yang kurang bagus dikarenakan medan yang ditempuh sangat terbatas dan

²² Mislaili, “Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menyebarkan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

²³ Tiara Indah dan Puji Hariyanti, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 12. No. 2, April 2018, 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya infrastruktur untuk bisa mencapai keberhasilan *good governance* di Kabupaten Kuantan Singingi.²⁴

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Rara Afianti yang berjudul **“Aktivitas Pengelolaan Informasi Layanan Publik Dalam Mewujudkan Kualitas Komunikasi Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar”**.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi layanan publik Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut: pengumpulan informasi yang merupakan informasi *update*, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian, dan pelayanan publik. Dengan memberikan pelayanan yang transparan, akurat, adil kepada publik maka badan publik dapat menghasilkan layanan yang berkualitas.²⁵

Pada penelitian diatas menjadi referensi bagi penulis dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan yaitu pada permasalahannya yaitu pada penelitian ini mengarah pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti *Perencanaan Kehumasan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik*.

C. Kerangka Pikir

²⁴Radinal Indra, “*Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya Good Governance*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

²⁵Rara Afianti, “*Aktivitas Pengelolaan Informasi Layanan Publik Dalam Mewujudkan Kualitas Komunikasi Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

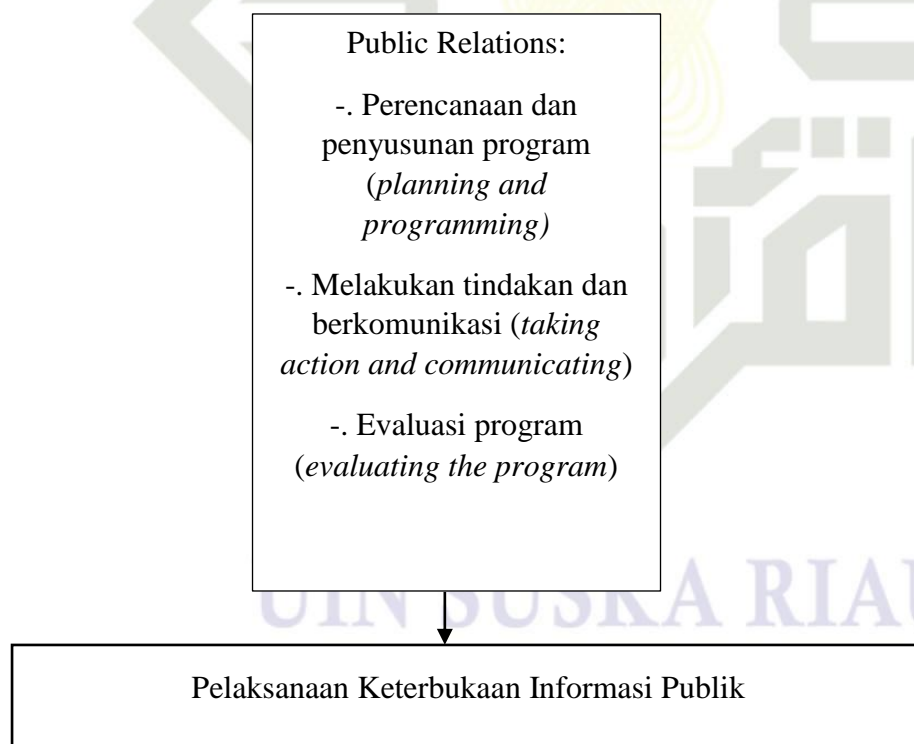
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka pikir adalah uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis.²⁶ Kerangka pikir bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa pernyataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka pikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian.²⁷

Sebagaimana bagan dibawah ini :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



²⁶Cik Hasan Basiri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 43.

²⁷Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metodologi deskriptif kualitatif karena bagi penulis dengan jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain dan dapat menemukan pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain serta dapat menemukan hipotesis dan teori. Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang agar menjadi objek penelitian. Format deskriptif kualitatif dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti studi tingkah laku konsumen, efek media, dan implementasi suatu kebijakan.²⁸

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.²⁹ Yaitu menggambarkan sebuah proses tentang bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan model studi kasus (*case study*) yaitu suatu model yang

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta:Kencana,2008), 69.

²⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekan pada eksplorasi dari suatu “sistem yang terbatas” pada suatu kasus secara mendetail. Bentuk studi kasus disesuaikan dengan tujuan peneliti dan metodologi yang mendasari. Ada tiga bentuk studi kasus, yaitu: studi kasus dengan instrumental tunggal (*single instrumental case study*), studi kasus kolektif atau majemuk (*collective or multiple case study*) dan studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*).³⁰ Penulis menggunakan bentuk studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*), studi kasus ini terfokus pada satu isu atau pusat perhatian saja, hanya digunakan pada satu kasus yang terbatas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Sm. Amin No. 9A Pekanbaru.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua macam data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individu atau kelompok.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Data yang diperoleh berbentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen serta arsip-arsip melalui kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

³⁰J.W Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (California: Sage Publications, Inc, 2007), 74.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta,2013), 376.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanahan Provinsi Riau melalui *website* (puprpkkp.go.id), media sosial serta buku-buku referensi pustaka.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami obyek penelitian.³² Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari wawancara yang dipilih sesuai dengan kriteria penelitian yang dianggap mampu, mengetahui serta sesuai dibidangnya tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau yang berjumlah 4 (empat) orang dan tentunya peneliti dapat merangkum informasi yang tepat dan dapat dipercaya.

Dalam memilih informan penulis menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³³ Teknik purposive sampling digunakan penulis, teknik ini mempunyai tujuan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat mewakili karakteristik populasi.

Informan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Informan Kunci (*informan key*) merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Informan Pendukung yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang

³² Maya Viana, “*Persepsi Pelanggan Terhadap Pelayanan Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010, 42.

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 156-157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat berdasarkan daftar nama informan penelitian dibawah ini:

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yasin Azwar, S.Ag	Pengelola Layanan Humas	Informan Kunci
2.	Oktadino H, S.Kom	Staff	Informan Pendukung
3.	Amelia Roza, SE	Staff	Informan Pendukung
4.	Fahrizal, S.Kom	Staff	Informan Pendukung

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.³⁴

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya dan dibantu dengan alat pancaindra lainnya.

³⁴Dedy Maulana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya 2010), 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang berkembang. Berdasarkan pelaksanaan, observasi dibagi dalam dua jenis, yaitu observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Kemudian observasi non partisipasi adalah observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti.³⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan harian, dan laporan ataupun dokumen, foto, CD dan hardisk atau film. Penulis melakukan dokumentasi untuk gambaran umum instansi, struktur organisasi, profil, serta situs Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, puprpkpp.go.id.³⁶

F. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Triangulasi yaitu upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan dengan kata lain bahwa pihak peneliti

³⁵ Arjuna, "Perencanaan Binmas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dalam Mensosialisasikan Pekanbaru Sebagai Kota Bersih", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

³⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melakukan '*check and recheck*' temuan-temuannya dengan cara membandingkan.³⁷

Validitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi serta gambar dan foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.³⁸

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber data dengan metode membandingkan hasil wawancara informan dengan observasi pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, sehingga dapat diperoleh data yang akurat mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai perencanaan atau tidak.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode non statistik yaitu deskriptif analitik yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan analisis data, kemudian semua data yang sudah terkumpul dan tersusun dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Analisis data juga dapat diartikan sebagai sebuah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan

³⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 217.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapan orang lain. Metode analisis data yang digunakan adalah model alur dengan beberapa tahap yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi. Penerapan teknik analisa tersebut dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang penting disusun secara sistematis sehingga memberikan gambaran jelas tentang hasil penelitian.
2. Display data, menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan dan disusun secara sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas dan sistematis tentang data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.
3. Pengambilan keputusan dan verifikasi merupakan proses penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam satu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalui informasi tersebut peneliti dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang benar sebagai objek penelitian.³⁹

³⁹ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Gambar 4.1

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau



Sumber: Profil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, Departemen Pekerjaan Umum sempat bernama: Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah (2000-2004), adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Openbare Werken* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Waterstaat Swerken*. Setelah Belanda menyerah dalam perang Pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 wilayah pemerintah, yaitu Jawa atau Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah tersebut.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan undang-undang darurat No 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958. Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

B. Visi

“Terwujudnya Riau yang berdaya saing, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau bersatu).”⁴⁰

C. Misi

Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. *Kedua*, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan. *Ketiga*, mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing. *Keempat*, mewujudkan budaya melayu negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing. *Kelima*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan oleh

⁴⁰ Puprpkpp.riau.go.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

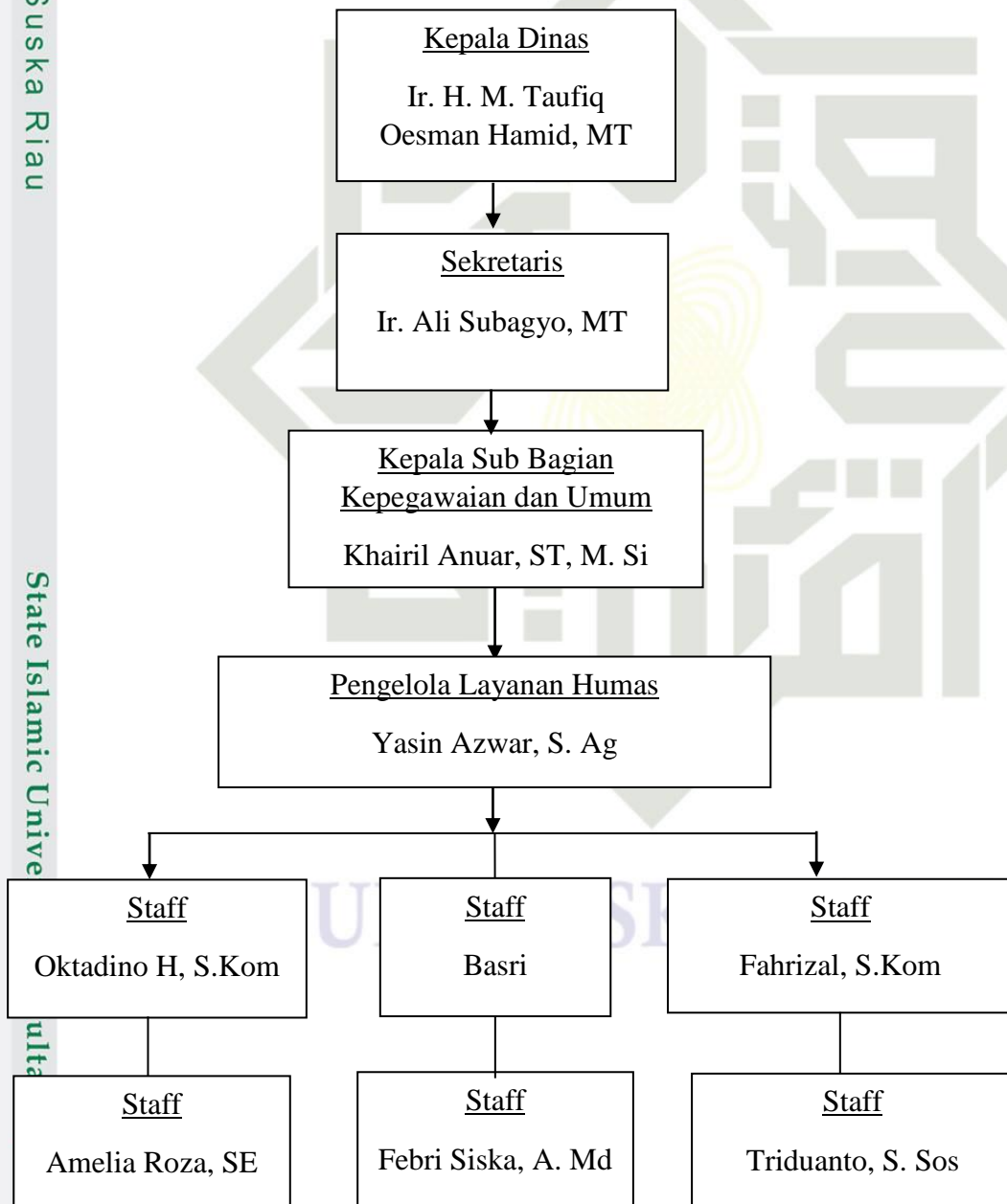
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu struktur organisasi harus dirancang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keadaan suatu perusahaan.⁴¹ Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Bagian Humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau



⁴¹ John M. Ivancevich, Konopaske, Robert. Matteson, Michael T. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, (Jakarta: Erlangga 2007), 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau pada tahun 2019 berjumlah 558. Sedangkan berdasarkan golongan akan diuraikan pada tabel 4.1 dan berdasarkan tingkat pendidikan akan diuraikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.1

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Pada Tahun 2019 Berdasarkan Golongan

No	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
1.	50 Orang			
2.		345 Orang		
3.			162 Orang	
4.				2 Orang

Sumber : Arsip Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Tabel 4.2

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau Pada Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	S2	S1	D-III	SMA/Sederajat	SMP/Sederajat	SD/Sederajat
1.	66 Orang					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		238 Orang				
			39 Orang			
				202 Orang		
					10 Orang	
						3 Orang

Sumber : Arsip Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

F. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah deskripsi pekerjaan berdasarkan struktur organisasi bagian humas pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana sekretaris menyelenggarakan fungsi: *Pertama*, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat. *Kedua*, penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat. *Ketiga*, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau. *Keempat*, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: *Pertama*, merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum. *Kedua*, membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum. *Ketiga*, mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat. *Keempat*, melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian. *Kelima*, melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan. *Keenam*, melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai. *Ketujuh*, membuat laporan perkembangan kepegawaian. *Kedelapan*, menyelenggarakan urusan kehumasan. *Kesembilan*, melaksanakan pengelolaan kearsipan dan

dokumentasi. *Kesepuluh*, melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas. *Kesebelas*, melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. *Keduabelas*, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. *Ketigabelas*, mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat. *Keempatbelas*, melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum. *Kelimabelas*, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menghimpun data dilapangan dan dilakukan pembahasan maka menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau berdasarkan langkah-langkah, yaitu: penyusunan program, melakukan tindakan dan berkomunikasi serta evaluasi program, sebagai berikut:

Penyusunan program dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dilakukan dengan cara menetapkan *stakeholder*, mengumpulkan informasi yang aktual dan memilih media. Tidak hanya itu, humas juga menyediakan layanan informasi berupa *call center* yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaannya seputar pembangunan Lalu humas menggunakan fasilitas pendukung yang berguna dalam kegiatan menyebarluaskan informasi.

Tindakan yang dilakukan oleh humas pada sebuah program dimulai dari tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dengan menggunakan *website* saja sebagai program layanan publik, pada tahun 2017 humas menggunakan facebook dan tahun 2019 media sosial pun menjadi pilihan humas untuk menyebarluaskan informasi seputar pembangunan infrastruktur. Komunikasi yang terjadi adalah baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi missed communication

Evaluasi program sudah diterapkan dengan baik oleh humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, dilihat dalam melakukan evaluasi humas mencari kendala atau permasalahannya dengan cara rapat agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan solusi. Humas juga sudah bertanggung jawab dengan berupaya menaati peraturan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini dilakukan humas dengan menyebarluaskan informasi seputar pembangunan infrastruktur dengan mempublikasikan setiap kegiatan, dokumen hasil kerja pada dinas melalui *website* dan media sosial.

B. Saran

1. Diharapkan agar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau dapat mengetahui kekurangan yang dimiliki dan menjadikan penelitian ini sebagai masukan, serta benar-benar memahami dan mengerti bagaimana melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik. Kemudian diharapkan agar meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi pada instansinya serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

2. Penulis juga menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama agar melakukan penelitian dengan menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian ini, sehingga ada kemajuan untuk para pembaca yang lain agar mengetahui referensi-referensi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku:

- Abdurrachman, Oemi. *Dasar-Dasar Public Relations*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Anggoro, Linggar M. *Teori Dan Profesi Kehumasan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Budianto, Heri Dan Farid Hamid. *Ilmu Komunikasi: Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Butterick, Keith. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Cangara, Hafied. *Perencanaan dan Strategi Komunitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Coulson-Thomas, Colin. *Public Relations: Pedoman Praktis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Creswell, J.W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, California: Sage Publications, Inc, 2007.
- Dipopramono, Abdulhamid. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Jakarta: Renebook, 2017.
- Djazuli dan Tri Suharno. *Keterbukaan dan Keadilan Indonesia*, Jakarta: PT Ghalia, 2006.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Effendy, Onong Uchjana. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikologis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fuchs. *Social Media A Critical Introduction*, Los Angeles: Sage Publications, 2014.
- Hamidati, Anis. *Komunikasi 2.0 Teoritisasi Dan Implikasi*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011.
- Handoko, T Hani. *Manajemen: Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE Press, 2009.
- Hasan Basiri, Cik. *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian Dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Husnan, Suad. *Perencanaan Perusahaan (Corporate Planning)*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Ivankevich, John M . Konopaske, Robert. Matteson, Michael T. *Perilaku Dan Manajemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga 2007.
- Jenkins, Frank dan Daniel Yadin. *Public Relations*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Public Relations, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jakarta: Graffiti, 1994.
- Kennedy John E Dan R Dermawan Soemanegara. *Marketing Communication Taktik Dan Strategi*, Jakarta: PT. Buana Ilmu Popular, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khiyantono, Rachmat. *Teori Public Relations*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Kurniali, Sartika. *Step By Step Facebook*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Kusumastuti. *Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Kustadi, Suhandang. *Public Relations Perusahaan*, Bandung: Nuansa, 2004.
- Leo Agung, M. *Berinternet Dengan Facebook Dan Twitter Untuk Pemula*, Yogyakarta: ANDI & Madcoms, 2011.
- Mandica Nur, Notrida G.B. *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009.
- Moore, Frazier. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- , *Humas: Prinsip, Kasus dan Masalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987.
- Morissan. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- , *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mcquail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: RajaGrafindo, 2004.
- Noor, Juliansyah. *Penelitian Ilmu Manajemen: Tinjauan Filosofis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Nurjaman, Kadar. *Komunikasi Public Relations, Panduan Untuk Mahasiswa, Birokrat, Dan Praktisi Bisnis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Panuju, Redi. *Komunikasi Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Rasid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- R. tonga, M.J. *Riset Kehumasan*, Jakarta: Gramedia, 2004.
- Robbins, Stephen P, Mary Coulter. *Manajemen*, Jakarta: PT. Indeks, 2004.
- Raslan, Rosady. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- , *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Rasid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Scot, Thomas. *Manajemen: Kepemimpinan dan Kolaborasi Dalam Dunia Yang Kompetitif Edisi 7*, Jakarta: Salemba 4, 2008.
- Setyowati. *Organisasi dan Kepemimpinan Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Soemirat, Soleh dan Elvinaro Ardianto. *Dasar-Dasar Public Relations*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharman. *Psikologi Kognitif*, Surabaya: Srikandi, 2005.
- Supranto, J. *Teknik Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suryadi. *Strategi Mengelola Public Relations Organisasi*, Jakarta: Edsa Mahkota, 2007.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syamsi, Ibnu. *Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Ujung Pandang: Persadi, 1987.
- Tisnawati, Ernie dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Tondowidjojo, John. *Dasar dan Arah Public Relations*, Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2015.
- Uman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widjaja. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

2. Skripsi

- Afrianti, Rara. "Aktivitas Pengelolaan Informasi Layanan Publik Dalam Mewujudkan Kualitas Komunikasi Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Kampar", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.
- Ajuna, "Perencanaan Binmas Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dalam Mensosialisasikan Pekanbaru Sebagai Kota Bersih", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.
- Dawana, Haris. "Pemanfaatan Akun Youtube Oleh Humas Kampar Sebagai Pusat Informasi", Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.
- Effendi, Arifman. "Strategi Komunikasi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Agam Dalam Mempromosikan Pariwisata Di Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agam”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

Fadhely Khirman, Rofie. “*Perencanaan Humas Dalam Pengelolaan Data Informasi Dan Publikasi Melalui Media Relation Di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Riau*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Fransiska, Nadia. “*Penyebarluasan Informasi Pembangunan Oleh Humas Pemerintahan Kota Pekanbaru*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

Humaira. “*Strategi Marketing Public Relations Dalam Mempromosikan Hotel Grand Suka Pekanbaru*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Indra, Radinal. “*Manajemen Humas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendukung Terciptanya Good Governance*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019.

Mislaili. “*Manajemen Humas Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Menyebarluaskan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

Priatni, Kiki. “*Penerapan Fungsi Humas Dalam Meningkatkan Informasi Publik Pada Pengadilan Agama Pekanbaru*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

Pujiyanti. “*Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.

Rianto Jambak, Apel. “*Perencanaan Komunikasi Humas PT Agung Toyota Cabang Sutomo Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017.

Vana, Maya. “*Persepsi Pelanggan Terhadap Pelayanan Hotel Ratu Mayang Garden Pekanbaru*”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010.

3. Jurnal

Aianto, Bismar dan Nazaki. “Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjung Pinang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2, Februari 2017.

Aliman S, Laurensius. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Maret 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Atis. "Strategi Komunikasi Public Relations", *Jurnal Sosial Budaya*, Vol .8, No. 2, 2011.
- Dewi, Kusuma Arum Sari Dan Wahyu Agus Winarno. "Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 11. No. 1, April 2012.
- Febrianingsih, Nunuk. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik", *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 1, No.1, April 2012.
- Gammahendra,Fianda."Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7, No.2, Januari 2014.
- Hidayatul Khusna, Isna dan Unggul Sugiharto. "Peran PPID Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Promedia*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.
- Herliani, Lia. "Analisis Pemanfaatan Situs Jejaring Situs Jejaring Sosial Facebook Sebagai Media Promosi Anggota Busam (Bubuhan Samarinda), *ejournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 4, 2015.
- Indah, Tiara dan Puji Hariyanti. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya", *Jurnal Komunikasi*, Vol 12. No. 2. April 2018.
- Kasmirus, Wiji. "Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintah Di Kabupaten Kutai Barat", *Jurnal Administrasi Reform*, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Kristiyanto. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 16. No. 2, Juni 2016.
- Lesmana, Nunung Indra."Penjadwalan Produksi Untuk Meminimalkan Waktu Produksi Dengan Menggunakan Metode Branch And Bound" , *Jurnal Teknik Industri*, Vol .17, No. 1, 2016.
- Mansyur, Ridwan. "Keterbukaan Informasi Di Peradilan Dalam Rangka Implementasi Integritas Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, Maret 2015.
- Nurdiansyah, Edwin. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat", *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 3, No. 2, November 2016.
- Prasetyo, Tony. "Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 2, Oktober 2016.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)", *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 1, Januari 2012.
- Syam, Fauzi. "Hak Atas Informasi Dan Legal Standing Para Pihak Dalam Sengketa Informasi Di Komisi Informasi", *Jurnal Inovatif*, Vol. 8, No. 1, Januari 2015.
- Saleh, Luluk. "Keterbukaan Informasi Publik: Perangkat Baru Menciptakan Good Governance Dalam Pemerintahan Lokal", *Jurnal Konstitusi*, Vol 3. No.1, Juni 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Timarsiah, Yunita Dan Muhajir Arafat, “Analisis Dan Perancangan Website Sebagai Sarana Informasi Pada Lembaga Bahasa Kewirausahaan Dan Komputer Akmi Baturaja”, *Jurnal Ilmiah MATRIK* , Vol .19, No. 1 , April 2017.

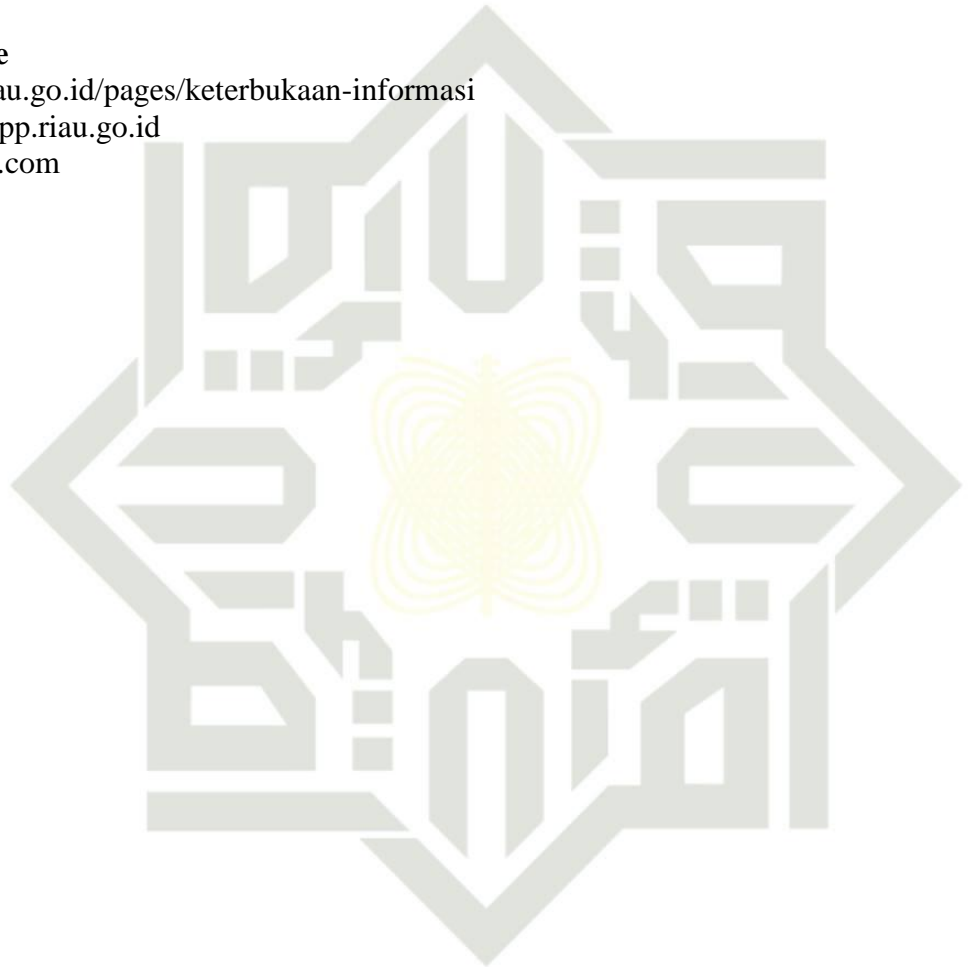
Zulaikha dan Agni Istighfar Paribrata. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Timur Tahun 2016”, *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 1, No.1, Juli 2017.

4. Website

<https://ppid.riau.go.id/pages/keterbukaan-informasi>

<https://puprpkpp.riau.go.id>

m.siagaonline.com



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan:

1. Siapa yang menjadi sasaran humas dalam melaksanakan keterbukaan informasi?
2. Apa alasan humas dalam memilih pihak-pihak tersebut sebagai sasaran informasi?
3. Bagaimana cara humas dalam mengumpulkan informasi yang aktual agar informasi tersebut dapat diterima di masyarakat?
4. Bentuk layanan informasi apa saja yang digunakan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?
5. Informasi apa yang diunggah secara mendadak dan tidak terjadwal?
6. Media apa saja yang digunakan untuk melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik?
7. Apa alasan humas memilih media online tersebut?
8. Program apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik?
9. Sejak kapan pelaksanaan program tersebut berjalan?
10. Apakah dalam pelaksanaannya keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan baik atau belum?
11. Bagaimana komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik?
12. Seberapa penting evaluasi program terhadap dalam keterbukaan informasi publik?
13. Bagaimana peran humas dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat karena kesalahpahaman terhadap keterbukaan informasi publik.?
14. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Informan Kunci

Nama: Yasin Azwar, S.Ag

Jabatan: Pengelola Layanan Humas

Waktu dan Tempat: 10.00 WIB/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Pertanyaan:

Kamis, 25 Juni 2020

1. Siapa yang menjadi sasaran humas dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: sasaran humasnya yang pasti stakeholder-stakeholder yang berhubungan dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kami, contohnya kalau di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau meliputi sumber daya air, cipta karya dan bina marga ya stakeholder nya ada di tiga TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) tersebut.

2. Bagaimana cara humas dalam mengumpulkan informasi yang aktual agar informasi tersebut dapat diterima di masyarakat?

Jawaban: dalam mengumpulkan informasi yang akurat berdasarkan dari segi keakuratan datanya, karena kalau dengan data yang akurat tentu informasi yang kita berikan lebih baik dan lebih jelas tetapi kalau tidak akurat itulah yang jadi permasalahan sebagai contoh jalan yang rusak diprovinsi Riau ada 100 sedangkan faktanya ada 150 berarti itu kan datanya tidak akurat.

3. Bentuk layanan informasi apa saja yang digunakan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawaban: kami juga ada call center untuk layanan pengaduan di 0761 5654550-564534.

4. Bagaimana komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: komunikasi yang terjadi pada sangatlah penting dalam proses melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis agar tidak terjadi *missed communication* sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan damai. Adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula sebaliknya.

Pertanyaan:

Jum'at, 26 Juni 2020

1. Apa alasan humas memilih media online?

Jawaban: alasannya media online yang kami pilih sebagai sarana untuk mensosialisasikan program atau setiap kegiatan yang kami lakukan dan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga.

2. Sejak kapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut berjalan?

Jawaban: pelaksanaan pada website itu pada tahun 2012 sejak ditetapkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau facebook pada terealisasi pada tahun 2017 dan instagram pada tahun 2019 akhir.

3. Apakah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum?

Jawaban: pada pelaksanaannya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau sudah baik, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan disepakati bersama sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat dan tetap melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyusun laporan pelaksanaan tugas berkala akan bermanfaat pada kedua pihak terutama dalam proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

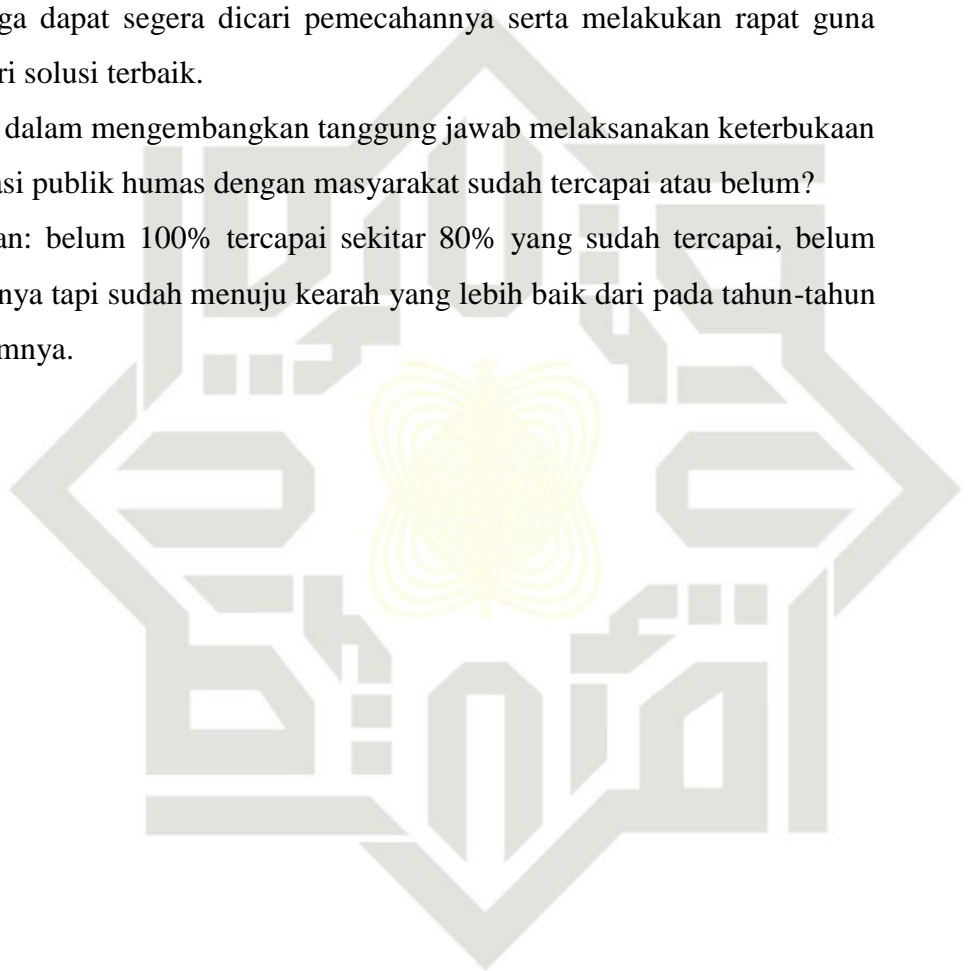
perencanaan humas, supaya masyarakat mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan kami untuk meningkatkan pelaksanaan pada humas.

4. Seberapa penting evaluasi program terhadap dalam keterbukaan informasi publik?

Jawaban: dengan melakukan evaluasi dapat melihat kendala yang terjadi sehingga dapat segera dicari pemecahannya serta melakukan rapat guna mencari solusi terbaik.

5. Apakah dalam mengembangkan tanggung jawab melaksanakan keterbukaan informasi publik humas dengan masyarakat sudah tercapai atau belum?

Jawaban: belum 100% tercapai sekitar 80% yang sudah tercapai, belum seutuhnya tapi sudah menuju kearah yang lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya.



UIN SUSKA RIAU

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Informan Pendukung

Nama: Oktadino H, S.Kom

Jabatan: Staff Humas

Waktu dan Tempat: 10.30 WIB/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Riau

Pertanyaan:

Kamis, 25 Juni 2020

1. Siapa yang menjadi sasaran humas dalam melaksanakan keterbukaan informasi?

Jawaban: untuk mendukung sasaran humas yang ingin dicapai, maka ditetapkan rencana kerja yang meliputi: Pertama, melaksanakan kegiatan koordinasi publikasi pembangunan yang efektif dan efisien dan Kedua, melaksanakan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

2. Bagaimana komunikasi yang terjadi pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: dalam proses komunikasi yang terjadi diartikan sebagai transfer informasi atau bisa juga dengan pengiriman pesan kepada penerima pesan, oleh sebab itu setiap organisasi termasuk instansi memerlukan komunikasi yang baik supaya setiap pekerjaan berjalan dengan baik, maka dari itu komunikasi yang baik dalam perencanaan humas sangat perlu dilakukan untuk kelancaran pekerjaan di dinas ini.

Pertanyaan:

Jum'at, 26 Juni 2020

1. Apa alasan humas memilih media online?

Jawaban: alasan kami menggunakan media online adalah untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat, dan menarik perhatian masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum?

Jawaban: sudah terlaksana, guna membantu proses perencanaan humas masyarakat dapat mengajukan aspirasinya, kritik serta saran yang berguna untuk dinas apabila terdapat kegiatan yang gak sesuai dengan harapan masyarakat sedangkan manfaat untuk dinas kami jadi termotivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas perencanaan pada humas.

3. Seberapa penting evaluasi program terhadap dalam keterbukaan informasi publik?

Jawaban: dengan evaluasi, kegiatan yang telah direncanakan akan dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan atau keberhasilan suatu program sehingga dapat segera ditentukan langkah-langkah selanjutnya yang seharusnya dilakukan dengan evaluasi juga rencana kegiatan yang hasil akan lebih ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan yang lebih baik lagi.

4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: kalau secara strukturalnya yang bertanggung jawab pertama kali itu yang pasti kepala dinas, sekretaris dan kasubbag kepegawaian dan umum.

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Informan Pendukung

Nama: Amelia Roza, SE

Jabatan: Staff Humas

Waktu dan Tempat: 13.40 WIB/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Pertanyaan:

Kamis, 25 Juni 2020

1. Bagaimana cara humas dalam mengumpulkan informasi yang aktual agar informasi tersebut dapat diterima di masyarakat?

Jawaban: pada bagian ini humas secara umum mempunyai tujuan menciptakan konsistensi komunikasi dengan berbagi pihak dalam rangka penyebarluasan informasi supaya dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dapat dipublikasikan dengan baik dan melaksanakan kegiatan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tepat.

Pertanyaan:

Jum'at, 26 Juni 2020

1. Apa alasan humas memilih media online?

Jawab: alasannya kami ingin publik itu jadi lebih mudah untuk mengakses informasi pembangunan, disini kami sebagai fasilitator dan menampung aspirasi masyarakat.

2. Sejak kapan pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut berjalan?

Jawaban: kalau untuk instagram baru dimulai pada tahun 2019 sedangkan website sejak berlakunya Undang-Undang keterbukaan informasi publik sekitar tahun 2012an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Informasi apa yang diunggah secara mendadak dan tidak terjadwal?

Jawaban: contoh seperti wafatnya salah satu pegawai, staff bahkan satpam yang ada di dinas ini, maka saat kami mendapatkan informasi itu sesegera mungkin kami langsung mengunggah berita duka tersebut di Instagram dengan ucapan belasungkawa.

4. Apakah pada pelaksanaannya keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan baik atau belum?

Jawaban: pelaksanaan di dinas ini sudah berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dan kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan sebelumnya juga berjalan dengan baik, akan menciptakan hubungan yang harmonis antara dinas dengan masyarakat dengan begitu akan menimbulkan rasa partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam meningkatkan perencanaan humas di dinas ini sebab peran humas dan masyarakat sangat diperlukan.

5. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: kami sebagai staff pengelola layanan humas sudah melakukan tanggung jawab kami dalam melaksanakan keterbukaan informasi tersebut ya dengan menggunakan media sosial (instagram dan facebook) terus website kami di www.pupr.go.id, kami mengupdate seperti data perhubungan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau.

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Informan Pendukung

Nama: Fahrizal S. Kom

Jabatan: Staff Humas

Waktu dan Tempat: 15.00 WIB/ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau

Pertanyaan:

Kamis, 25 Juni 2020

1. Apa alasan humas dalam memilih pihak-pihak tersebut sebagai sasaran informasi?

Jawaban: ya karena mereka yang lebih paham mengenai fakta dilapangannya karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang akan kami mintai datanya.

2. Program apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: kalau kita sudah menggunakan sosmed untuk melaksanakan keterbukaan informasi ke public, salah satunya kita sudah punya instagram khusus dinas disana kita sebar informasi mengenai data perhubungan dinas atau apa saja kegiatan yang dilakukan. Kita juga punya website tersendiri di www.puprpkpp.riau.go.id disana juga ada informasi yang bersifat narasi, karena kalau di sosmed kami hanya menonjolkan foto ketimbang narasinya.

Pertanyaan:

Jum'at, 26 Juni 2020

1. Kapan pelaksanaan program tersebut dijalankan?

Jawaban: pada pelaksanaannya proses mengunggah ini humas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau mempunyai SOP (Standard Operational Procedure) salah satunya adalah jumlah informasi yang diunggah di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instagram minimal ada tiga unggahan berupa video dan foto. Unggahan tersebut dibagi kedalam dua waktu yaitu, pagi hari sekitar pukul 09.00-11.00 dan siang hari sekitar pukul 13.30-15.30.

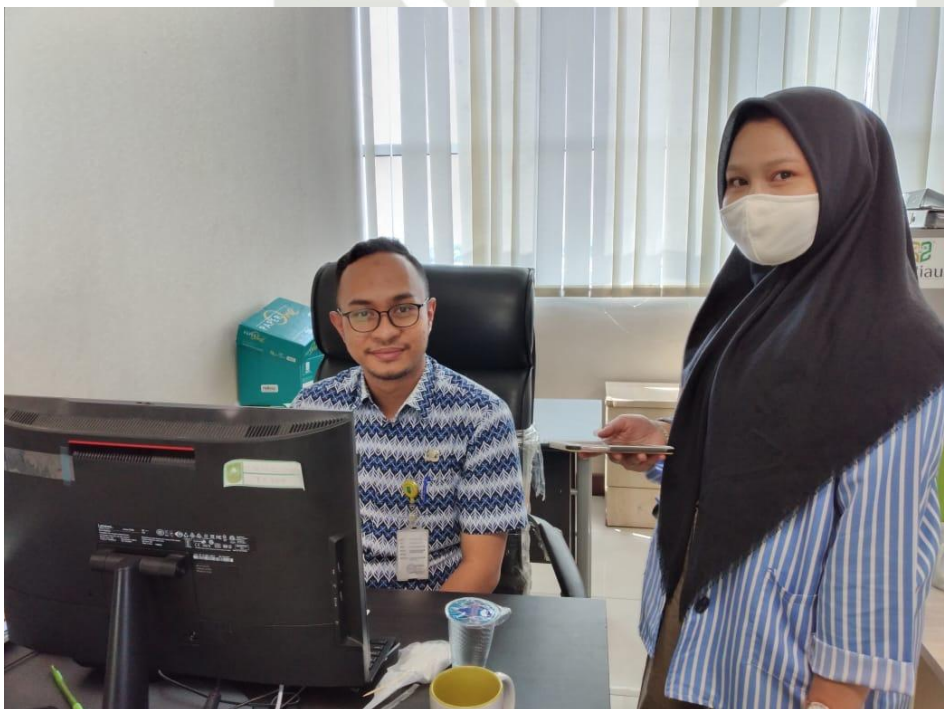
2. Bagaimana peran humas dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat karena kesalahpahaman terhadap keterbukaan informasi publik?

Jawaban: humas disini berperan penting, karena pihak humaslah yang berhadapan dulu dengan masyarakat jika terjadi kesalah pahaman atau pertikaian dengan cara menjelaskan atau mengclearkan masalah itu agar lebih baik.

3. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik?

Jawaban: ini menjadi tanggung jawab kami sebagai staff, tugas yang kami lakukan setiap hari seperti mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat, membuat laporan kinerja pegawai, melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan. Cuma untuk dokumentasi dan publikasi di sosmed dalam tugas kehumasan kami juga yang mengerjakan karena tidak ada staff khusus humas disini.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

